

PENGLOLAAN PASAR DESA OLEH PEMERINTAH DESA PANAWANGANA KECAMATAN PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS

Ai Rizkiah

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: airizkiah09@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi Pengelolaan Pasar Desa Oleh Pemerintah Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis belum optimal. Hal itu terlihat dari beberapa indikator permasalahan yaitu: belum dilakukan renovasi pasar, penegakan sanksi terhadap pedagang dalam membayar retribusi tidak sesuai aturan yang berlaku dan pengelolaan arsip yang tidak baik mengenai paeraturan desa tentang pasar sehingga mengakibatkan arsip hilang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini sebanyak 9 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengelolaan Pasar Desa secara umum belum optimal karena terdapat hambatan-hambatan, seperti: belum tercapainya pencapaian tujuan, belum terlihat adanya program kerja, tanggung jawab tim pengelola dan pemerintah desa belum sepenuhnya berjalan, kemudian belum terlihat peran pemerintah dalam meningkatkan kekompakan tim, hanya sebgaian tim pengelola yang melakukan pelaporan secara berkala, serta belum terlaksananya pengawasan kinerja. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dilakukan upaya diantaranya mengoptimalkan fungsi-fungsi manajemen untuk mewujudkan pengelolaan yang optimal.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Pasar Desa*

PENDAHULUAN

Desa merupakan wilayah administratif yang berada dibawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, menyebutkan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan pengertian desa diatas, desa memiliki daerah otonominya sendiri dimana desa memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat yang disebut dengan otonomi desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Ulumiyah, et al. (2013) mengatakan bahwa:

“.....pemerintah desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.”

Berbicara otonomi desa, dalam pengembangannya memiliki prinsip pemerintahan untuk mengatur atau mencukupi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut yang sesuai dengan adat dan norma setempat. Untuk mewujudkan tercukupinya kebutuhan masyarakat maka pemerintah desa memerlukan dana untuk membiayai pelayanan dan pembangunan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes). Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) tentang desa menyebutkan bahwa sumber pemasukan PADes berasal dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan yang sah.

Dari penjelasan dalam UU tersebut, maka terdapat kesempatan yang luas bagi Pemerintah Desa untuk menggali dan memanfaatkan potensi desa untuk dijadikan sumber pendapatan. Oleh karena itu Pemerintah Desa Panawangan membentuk pasar desa atas pemanfaatan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.

Pasar desa merupakan salah satu kekayaan desa yang dapat dikelola oleh Pemerintah Desa dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa yang perlu dibina dan dikelola. Selain itu keberadaan pasar desa berfungsi sebagai sarana distribusi dan memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen, sebagai tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa kepada konsumen, sebagai pusat interaksi dan sebagai jual beli secara langsung yang biasa dilakukan secara

tawar menawar sebagai ciri khas suatu pasar. Pasar desa secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai bagian dari usaha sektor informal yang dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal.

Pasar identik dengan kondisi kumuh, jorok dan umpek-umpekan. Ditambah dengan pelayanan bagi pedagang yang sering memanipulasi terhadap kuantitas dan kualitas barang. Selain itu adanya faktor lain seperti kurangnya sarana dan prasarana, serta kondisi yang tidak nyaman semakin mengurangi kepercayaan dan ketertarikan konsumen untuk memilih pasar sebagai ruang pemenuhan kebutuhannya. Sedangkan menurut Bayu Krisnamurthi Wakil Menteri Perdagangan tahun 2011-2014 dalam *Republika.co.id* Senin, 23 April 2012 menyatakan bahwa kondisi pasar yang baik adalah pasar yang bersih agar terhindar dari berbagai penyakit, pasar yang tertib terhindar dari kecurangan saat jual beli serta pasar yang mempromosikan produk-produk dalam negeri. Begitupun kondisi dilapangan, pasar Desa Panawangan bagian pedagang ikan asin dan sayur-sayuran yang berada di area belakang terlihat jorok, bau dan tidak nyaman, saluran air yang tidak lancar, atap-atap pasar bocor, serta kondisi fisik yang kurang

menarik akibat belum adanya perbaikan.

Pasar akan berjalan dengan optimal apabila terdapat manajemen pengelolaan didalamnya. Pengelolaan dimaksudkan untuk menciptakan pasar yang dapat mensejahterakan pedagang, selain itu juga pengelolaan didirikan untuk menciptakan kenyamanan pembeli dalam berbelanja serta untuk menambah pendapatan asli desa. Pengelolaan pasar yang dimaksud seperti pengaturan pedagang kios dan los, pengelolaan sampah dan limbah, penyediaan lahan parkir, pemeliharaan gedung dan pengaturan fasilitas penunjang lainnya yang menjadi kunci penting untuk mengubah citra kumuh, jorok dan umpek-umpekan. Dalam pengelolaan pasar merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa sebagai pelayanan sektor publik terhadap masyarakat karena dengan meningkatkan pelayanan ruang publik diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pasar yang sebagian pendapatannya diretribusi kepada Pemerintah Desa. Sebaliknya jika pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah desa belum terlaksana dengan optimal pada akhirnya akan timbul ketidakpuasan dari para konsumen atau pelanggan pasar, sehingga semakin lama akan meninggalkan pasar karena kenyamanan serta pelayanan terhadap sarana dan prasarana tidak dirasakan sesuai dengan keinginan para konsumen. Oleh karena itu tata kelola yang profesional diharapkan dapat

menjaga keberlangsungan pasar dengan peningkatan daya saing pasar desa dengan pasar modern yang kini semakin merambah luas hingga ke pelosok daerah sehingga akan dapat memberikan kepuasan pelayanan yang baik terhadap pelanggan atau masyarakat.

Pengelolaan pasar desa dalam meningkatkan tata kelola pengelolaan pasar desa yang optimal perlu didukung oleh sumber daya manusia dan juga sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan pasar, begitupun dalam segi sarana dan prasarana yang dituntut untuk lebih menarik sehingga pembeli tertarik untuk berbelanja ke pasar. Selain itu juga dalam tata pengelolaan arsip sebaiknya diperhatikan lebih baik lagi, hal ini dikarenakan arsip dapat berguna untuk membantu dalam pedoman pengelolaan pasar desa.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, diketahui pengelolaan pasar desa oleh Pemerintah Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis belum optimal, hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator masalah sebagai berikut:

1. Belum dilakukannya renovasi pasar desa. Hal ini terlihat dari kondisi bangunan yang kurang terawat sehingga pasar terlihat kurang menarik dimata konsumen dan terdapat salah satu atap pasar yang miring sehingga ditopang oleh bambu.

2. Penegakan sanksi terhadap pedagang dalam membayar retribusi hanya berupa teguran lisan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pedagang yang melanggar. Hal ini terlihat dari aturan tentang membayar retribusi dimana bagi pedagang yang mengalami penunggakan bayar retribusi selama 3 bulan akan dicabut masa sewanya tetapi yang terjadi hanya diberikan teguran lisan saja.

3. Terdapat pengelolaan arsip yang tidak baik, hal ini terlihat dari hilangnya arsip mengenai peraturan pasar desa sehingga berakibat pada pengelola pasar yang tidak lagi berpedoman terhadap peraturan tersebut, dikarenakan adanya pergantian kepala desa yang menyebabkan tidak adanya pembaharuan mengenai peraturan pasar desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Pengelolaan Pasar Desa Panawangan Oleh Pemerintah Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis?

KAJIAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Pengelolaan
 - 1). Konsep manajemen
Menurut Hasibuan (2016:2) mendefinisikan bahwa: Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber

daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien.

Kemudian menurut Tead (Rohman, 2018:12) mengemukakan bahwa:

Manajemen sebagai suatu proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing aktivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2). Konsep Pengelolaan

Menurut Pollet (Rohman, 2018:11) mendefinisikan pengelolaan adalah:

Pengelolaan (manajemen) merupakan seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Sejalan dengan Pollet, Stoner (Rohman, 2018:11) mendefinisikan bahwa:

Pengelolaan (manajemen) sebagai proses dimaknai sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya lainnya agar dapat secara maksimal mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dari pemaparan kedua konsep manajemen dan pengelolaan, dapat dikatakan bahwa pengelolaan merupakan bagian dari sebuah manajemen. Hal ini sejalan dengan Stoner (Sahir, et al, 2020:14), menyatakan bahwa:

Manajemen (pengelolaan) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan

penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kemudian Rohman (2018: 13), mengatakan bahwa:

Manajemen adalah suatu upaya pemberian bimbingan dan pengarahan melalui perencanaan, koordinasi, pengintegrasian, pembagian tugas secara profesional, dan proporsional, pengorganisasian, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan melalui orang lain menuju suatu tujuan yang telah ditetapkan agar berjalan secara efektif dan efisien.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang selalu ada dan berada dalam proses manajemen yang menjadi patokan bagi manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Berkenaan dengan itu Fayol (Rohman, 2018:25) membagi 5 Fungsi dasar manajemen yaitu:

Planning (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Commanding* (Pengarahan), *Coordinating* (Pengoordinasian) dan *Controlling* (Pengawasan).

1). *Planning* (Perencanaan)

Menurut Terry (Hasibuan, 2016:92) mengemukakan bahwa perencanaan adalah:

Memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Kemudian menurut Tjokroamidjojo (Syafalevi 2011: 28) mengatakan bahwa:

Perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Adapun asas-asas perencanaan menurut Hasibuan (2016:93-94) diantaranya sebagai berikut:

1. *Principle of contribution to objective*
2. *Principle of efficiency of planning*
3. *Principle of primacy of planning* (asas pengutamakan perencanaan)
4. *Principle of pervasiveness of planning* (asas pemerataan perencanaan)
5. *Principle of planning premise* (asas patokan perencanaan)
6. *Principle of policy frame work* (asas kebijakan pola kerja)
7. *Principle of timing* (asas waktu)
8. *Principle of planning communication* (asas tata hubungan perencanaan)

9. *Principle of alternative* (asas alternatif)
10. *Principle of limiting factor* (asas pembatasan faktor)
11. *The commitment principle* (asas keterikatan)
12. *The principle of flexibility* (asas fleksibilitas)
13. *The principle of navigation change* (asas ketetapan arah)
14. *Principle of strategi planning* (asas perencanaan strategis)

2). Organizing (Pengorganisasian)
 Pengorganisasian menurut Rohman (2018:99) menyatakan bahwa: Pengorganisasian merupakan suatu proses atau upaya penyalarsan berbagai aspek yang ada dalam sebuah organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Hasibuan (2016:118) mendefinisikan bahwa pengorganisasian adalah sebagai berikut:

Suatu proses perencanaan, pengelompokan, dan pengaturan macam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik, efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan, secara selektif maka terdapat asas-asas pengorganisasian menurut Hasibuan

(2016:123-125) diantaranya sebagai berikut:

1. *Principle of organizational objectives* (asas tujuan organisasi)
2. *Principle of unity of objective* (asas kesatuan tujuan)
3. *Principle of unity of command* (asas kesatuan perintah)
4. *Principle of the span of management* (asas rentang kendali)
5. *Principle of delegation of authority* (asas pendelegasian wewenang)
6. *Principle of parity of authority and responsibility* (asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab)
7. *Principle of responsibility* (asas tanggung jawab)
8. *Principle of departementation* (*principle of devision of work* = asas pembagian kerja)
9. *Principle of personal placement* (asas penempatan personalia)
10. *Principle of scalar chain* (asas jenjang berangkai)
11. *Principle of efficiency* (asas efisiensi)
12. *Principle of continuity* (asas kesinambungan)
13. *Principle of coordination* (asas koordinasi)
- 3). Commanding (Pengarahan)

Menurut Hasibuan (2016:183-184) menyebutkan bahwa:

Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, menggerakkan, mengatur

segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Fungsi pengarahannya (*directing=actuating=leading=penggerakkan*) adalah fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen.

Selanjutnya Sukarna (2011:86) menyebutkan bahwa:

Penggerakan (*actuating*) merupakan sebagai suatu pelaksanaan untuk menjalankan, atau menggerakkan anggota, dan mendorong yang tidak lain merupakan upaya mewujudkan rencana menjadi realisasi melalui berbagai pengarahannya dan motivasi supaya anggota atau karyawan tersebut dapat melaksanakan kegiatan atau pekerjaannya secara optimal.

Dimana motivasi menurut Hasibuan (2016: 218) mengatakan bahwa:

Motivasi merupakan suatu perangsang keinginan (*wan*) dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang. Setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Adapun asas-asas motivasi menurut Hasibuan (2016:221) sebagai berikut:

1. Asas mengikutsertakan, artinya mengajak bawahan untuk ikut berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka mengajukan pendapat, rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan.
2. Asas komunikasi, artinya menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai,

- cara-cara mengerjakannya, dan kendala-kendala yang dihadapi.
3. Asas pengakuan, artinya memberikan penghargaan, pujian dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapainya.
 4. Asas wewenang yang didelegasikan, artinya memberikan kewenangan dan kepercayaan diri pada bawahan, bahwa dengan kemampuan dan kreativitasnya ia mampu mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik.
 5. Asas adil dan layak, artinya alat dan jenis motivasi yang diberikan harus berdasarkan atas “asas keadilan dan kelayakan” terhadap semua karyawan.
 6. Asas perhatian timbal-balik, artinya bawahan yang berhasil mencapai tujuan dengan baik maka pimpinan harus bersedia memberikan alat dan jenis motivasi.
- 4). Coordinating (Pengkoordinasian)
Menurut Djamin (Hasibuan,2011:86) mengatakan bahwa:
Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.
- Menurut Handyaningrat (2011:118) menyebutkan bahwa terdapat beberapa ciri-ciri koordinasi diantaranya sebagai berikut:
1. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama
Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.
 2. Konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi
Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha /tindakan-tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam sebagai kelompok dimana mereka bekerjasama.
 - 5). Controlling (Pengawasan)
Kemudian menurut Koonzt (Hasibuan, 2016:241) mengatakan bahwa:
Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.
Menurut Hasibuan (2016: 245-246) bahwa teknik atau cara pengawasan sebagai berikut:
 1. Pengawasan Langsung
Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasil –hasilnya sesuai dengan yang dikehendakinya.

2. Pengawasan Tidak Langsung
Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai.
3. Pengawasan berdasarkan kekecualian
Pengawasan berdasarkan kekecualian adalah pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengendalian semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh manajer.
4. Tinjauan Tentang Pasar
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, menyatakan bahwa: Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
Selanjutnya Hanri Ma'ruf (Aditia Warman, 2019: 172) kata "pasar" memiliki 3 pengertian, antara lain:
 1. Pasar dalam arti "tempat", merupakan sebuah tempat untuk bertemunya para penjual dengan pembeli.
 2. Pasar dalam arti "penawaran serta permintaan", merupakan pasar sebagai tempat terjadinya kegiatan transaksi jual beli
 3. Pasar dalam arti "sekumpulan anggota masyarakat yang mempunyai kebutuhan serta daya beli". Lebih merujuk pada 2 hal yaitu daya beli dan kebutuhan. Pasar merupakan sekumpulan orang yang berusaha untuk mendapatkan jasa atau barang serta mempunyai kemampuan untuk membeli barang tersebut.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 4 Nomor 42 Tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa, menyebutkan bahwa, dibentuknya pasar desa bertujuan untuk:
 1. Memasarkan hasil produksi perdesaan;
 2. Memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan;
 3. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
 4. Menciptakan lapangan kerja;
 5. Mengembangkan pendapatan pemerintah daerah;
 6. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
 7. Mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.
Pasar desa dalam proses kehidupan masyarakat memiliki peran penting, khususnya dalam pembangunan ekonomi di pedesaan, setidaknya dalam 3 hal, yaitu:

1. Sebagai entitas ekonomi, pasar desa merupakan penggerak roda ekonomi pedesaan melalui kegiatan perdagangan, industri dan jasa;
 2. Sebagai entitas sosial, pasar desa merupakan sarana yang sangat kuat dalam mempertahankan budaya dan nilai sosial lokal, seperti gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan. Karena pertemuan penjual dan pembeli di pasar desa bukan hanya melaksanakan transaksi ekonomi, tetapi sekaligus menjadi media interaksi sosial.
 3. Sebagai aset pembangunan, pasar desa merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Pemerintah Desa (PADes). Pendapatan tersebut berasal dari retribusi para pedagang dan pelaku usaha jasa yang beraktifitas di dalam dan sekitar pasar desa
- Menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang pengelolaan pasar desa bahwa pengelolaan pasar desa dilaksanakan pemerintah desa yang secara terpisah dengan manajemen pemerintah desa. Susunan organisasi pengelola pasar desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa, sedangkan pengelolaan pasar desa harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi, maka dari itu pemerintah desa

menunjuk pengelolaan dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

METODE

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 orang. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data serta verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun untuk mengetahui Pengelolaan Pasar Desa Oleh Pemerintah Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dapat ditinjau dari teori Fayol (Rohman, 2018:25) mengenai Fungsi-fungsi manajamen untuk mewujudkan pengelolaan pasar desa yang optimal adalah sebagai berikut: Fungsi *Planning* (perencanaan), Fungsi *organizing* (pengorganisasian), Fungsi *commanding* (pengarahan), Fungsi *coordinating* (pengoordinasian), dan Fungsi *controlling* (pengawasan).

a. Fungsi *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan dalam sebuah organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam berjalannya suatu keorganisasian untuk mencapai program sesuai rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya

perencanaan diharapkan dapat memprediksi hal-hal yang akan terjadi selanjutnya yang disebabkan oleh perubahan, kondisi dan situasi.

1). Adanya pencapaian tujuan pengelolaan dalam mengoptimalakan pengelolaan pasar desa

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa belum terlihat adanya pencapaian tujuan dalam mencapai pasar desa yang optimal, hal ini terlihat dari rencana-rencana yang sudah disusun sebelumnya belum terealisasikan sehingga belum mencapai suatu pencapaian tujuan yang diharapkan. Salah satunya dalam renovasi pasar dimana perlu adanya persiapan yang matang agar kedua belah pihak antara pembeli dan Pemerintah Desa tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga perlu adanya perencanaan yang matang. Hal ini tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh Athoillah (Rohman, 2018:91) bahwa empat tahap dasar perencanaan yaitu:

1. Menetapkan sasaran atau perangkat tujuan
2. Menentukan keadaan, situasi, dan kondisi sekarang
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat
4. Mengembangkan rencana dan menjabarkannya.

Dengan demikian untuk saat ini pihak desa dan tim pengelola belum memenuhi empat tahap dasar perencanaan tersebut salah satunya dalam mengidentifikasi faktor

pendukung dan penghambat, yang lebih tepatnya dalam penghambatannya yaitu kurangnya gerak cepat Pemerintah Desa dan tim pengelola dalam pengajuan pembangunan renovasi sehingga sebelum tepat lepas kontrak 10 tahun pasar dapat direnovasi.

2). Adanya program kerja dalam pengelolaan pasar desa

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa belum terlihat adanya program kerja dalam pengelolaan Pasar Desa Panawangan, hal ini terbukti dari belum adanya inovasi-inovasi baru yang dibuat oleh Pemerintah Desa dan pengelola untuk mengoptimalkan pasar kedepannya.

Hal ini tidak sejalan dengan yang dikemukakan oleh Santosa (Soesanto, 2011:17) menyatakan bahwa:

Program kerja merupakan suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi.

Dengan demikian meskipun terdapat rencana renovasi untuk mengoptimalkan pasar, tetapi rencana renovasi tersebut merupakan program kerja yang sering dilakukan setiap 10 tahun sekali sesuai aturan yang berlaku sejak dulu, tetapi untuk inovasi-inovasi lain untuk mengoptimalkan pasar baik dari sisi Pemerintah Desa maupun tim pengelola sejauh ini belum terlihat.

**b. Fungsi *organizing*
(pengorganisasian)**

Dalam Pengelolaan pasar, pengorganisasian ini dipandang sebagai upaya untuk menelaraskan aspek-aspek yang terdapat dalam pengelolaan seperti menyesuaikan struktur organisasi dengan tujuan, lingkungan dan keberadaan sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi.

1). Pembagian kerja antara pemerintah desa dengan pengelola

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa adanya pembagian kerja antara Pemerintah Desa dengan pengelola Pasar Desa Panawangan, hal ini dibuktikan dengan adanya Pemerintah Desa sebagai penanggung jawab secara keseluruhan, pak mandor sebagai penagih retribusi, kebersihan sebagai orang yang membersihkan pasar serta keamanan sebagai pihak yang mengamankan pasar khususnya saat malam hari. Oleh sebab itu dengan adanya pembagian kerja tersebut maka dijadikan sebagai salah satu cara agar pengelolaan pasar dapat berjalan optimal, nyaman dan banyak pembeli untuk datang ke pasar. Serta tidak adanya tumpang tindih pekerjaan yang dikerjakan pengelola.

2). Penempatan pengelola sesuai dengan kemampuan

Dengan demikian, dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sudah adanya penempatan pengelola sesuai

dengan kemampuan. Hal ini dibuktikan dengan kinerja yang dilakukan oleh pengelola sudah terlihat maksimal, karena sudah berpengalaman bekerja puluhan tahun dan sudah sesuai dengan posisi pekerjaannya. Dengan pengalaman dan kecakapan yang dimiliki maka dapat terlihat kualitas kemampuan pengelola dalam mengelola pasar.

3). Tanggung jawab pemerintah desa dan pengelola pasar

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa belum sepenuhnya tanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan tim pengelola dijalankan, hal ini masih terdapat permasalahan yang belum diselesaikan serta dilaksanakan dengan baik, contohnya dalam penanganan arsip serta belum dilaksanakannya aturan bagi penjual yang belum membayar retribusi selam 3 bulan. Namun secara keseluruhan Pemerintah Desa dan tim pengelola dalam menjalankan tugas pokoknya masing-masing, baik secara individu maupun bersama dengan rekannya yang dilaksanakan setiap harinya sudah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik kepada Pemerintah Desa sebagai pemberi mandat.

**c. Fungsi *commanding*
(pengarahan)**

Sebagai proses pengelolaan ini merupakan suatu arahan maupun motivasi yang diberikan kepada bawahan untuk mendorong gairah bekerja dengan memberikan

kemampuan dan keterampilannya sehingga proses pengelolaan dapat berjalan secara optimal. Pengarahan berupa pengarahan secara langsung seperti memberikan motivasi dan pengarahan tidak langsung seperti pemberian reward.

1). Partisipasi pemerintah desa dalam pengelolaan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa sudah adanya partisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola pasar desa, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keikutsertaan Pemerintah Desa dalam mengelola Pasar Desa Panawangan, seperti menampung aspirasi dan memberikan sarana dan prasarana untuk dapat meningkatkan pasar.

2). Komunikasi antara pemerintah desa dan tim pengelola

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa komunikasi antara Pemerintah Desa dengan tim pengelola sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan bahwa informasi yang diberikan baik dari Pemerintah Desa maupun dari tim pengelola sudah jelas serta dapat dipahami, sehingga dapat mengurangi adanya miskomunikasi yang dapat menyebabkan permasalahan muncul. Selain itu dengan adanya komunikasi yang efektif semua proses pengelolaan dapat terealisasikan.

d. Fungsi *coordinating* (pengoordinasian)

Pengkoordinasian dalam pengelolaan pasar berfungsi sebagai

alat untuk menyatukan pengelola agar memberikan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan pasar sehingga dapat berjalan secara optimal.

1). Kerjasama antara pemerintah desa dengan pihak-pihak lainnya

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa sudah adanya kerjasama antara pihak desa dengan pihak lainnya, hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama antara BPD, LPM, karang taruna, serta pedagang pasar. Dimana dengan adanya kerjasama ini koordinasi dapat terselenggarakan dengan baik dengan tujuan untuk mengoptimalkan Pasar Desa Panawangan.

2). Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan kekompakan tim

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui belum adanya peran pemerintah dalam upaya meningkatkan kekompakan tim pengelola, hal ini terlihat belum terlihat pemimpin yang mengatur kegiatan agar tim pengelola serasi atau kompak sehingga belum terjalin rasa kekeluargaan antara Pemerintah Desa dan tim pengelola.

e. Fungsi *controlling* (pengawasan)

Pengawasan dalam pengelolaan pasar berarti proses akhir yang sangat penting dalam pelaksanaan pengelolaan, hal ini dikarenakan bahwa pengawasan dapat mengetahui tujuan pengelolaan sudah optimal atau tidak, oleh karena itu peranan pengawasan ini menentukan baik atau buruk pelaksanaan suatu rencana.

1). Pengawasan langsung

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa sudah adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, hal ini terbukti dari adanya aparat desa yang turun langsung ke pasar untuk meninjau keadaan pasar yang dilakukan sebanyak dua kali dalam sebulan, namun jika keadaan genting terjadi aparat desa akan segera menindak lanjuti permasalahan tersebut.

2). Pelaporan perkembangan secara berkala

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa belum adanya laporan secara berkala, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan yang dilakukan hanya sebagian tim pengelola saja, yaitu pak mandor yang melakukan pelaporan secara berkala berupa lisan maupun tulisan setiap satu bulan sekali dalam laporan hasil retribusi, sedangkan laporan lainnya dari pihak kebersihan dan keamanan tidak melakukan laporan tersebut.

3). Pengawasan terhadap tim pengelola

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat dikatakan bahwa sudah ada pengawasan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap tim pengelola, namun kegiatan tersebut tidak diperlihatkan secara khusus dan dilakukan dari kejauhan, hal ini dikarenakan rasa percaya Pemerintah Desa terhadap kinerja tim pengelola yang sudah

bekerja puluhan tahun. Selain itu Pemerintah Desa akan mengawasi kinerja secara langsung apabila terdapat permasalahan terhadap kinerja tim pengelola dan akan mencari solusi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Pasar Desa Oleh Pemerintah Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, simpulan dari hasil penelitian ini dapat penulis uraikan bahwa Pengelolaan Pasar Desa Oleh Pemerintah Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara dan observasi diketahui belum berjalan dengan optimal, masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dalam pengelolaannya, seperti belum tercapainya pencapaian tujuan, belum terlihat adanya program kerja, tanggung jawab yang dilakukan oleh tim pengelola dan Pemerintah Desa belum sepenuhnya berjalan, kemudian peran pemerintah yang belum terlihat dalam meningkatkan kekompakan tim, selanjutnya belum dilaksanakan pelaporan secara berkala yang dilakukan oleh sebagian tim pengelola dan belum terlaksananya pengawasan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap tim pengelola. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi berupa belum adanya renovasi yang diadakan setiap 10 tahun sekali karena adanya pandemi, kemudian

belum adanya inovasi-inovasi baru sebagai pembuat program kerja untuk mengoptimalkan pasar, setelah itu lalainya pemerintah desa dan kepala pasar sehingga mengakibatkan hilangnya arsip mengenai peraturan desa tentang pasar dan belum diterapkannya sanksi bagi pedagang yang telat membayar iuran retribusi 3 bulan berturut-turut, selanjutnya belum ada rasa kekeluargaan antara pemerintah desa dengan tim pengelola, serta belum adanya pelaporan secara berkala yang dilakukan oleh kebersihan dan keamanan. Maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti menjadwalkan ulang proses renovasi dan saat ini pemerintah desa sudah membuat susunan panitia bagi perenovasian pasar, kemudian akan dilakukannya musyawarah untuk menyusun program kerja dan peraturan desa tentang pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Aditiawarman, mac. 2019. *Variasi Bahasa Masyarakat Kajian Aset Budaya*. Indonesia :Tonggak Tio
- Handyaningrat, Soewarno.2011. *Pengantar Study Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Hasibuan, Malayu. 2016. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Angkasa.

Rohman. 2018. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Empat Dua.

Sahir,et al. 2020. *Gagasan Manajemen*. Yayasan Kita Menulis.

Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta:Mandar Maju

Dokumen Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 4 Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Jurnal-Jurnal Penelitian

- Ulumiyah,I.et.al. 2013. *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)* Jurnal Adminiatrasi Publik (JAP), Vol 1, No.5, Hal. 890-899. Diakses tanggal 10 November 2021 sari Google scholar.